



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 768 /HK/424.013/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2025

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005-2025;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2024;
20. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan 2024-2026;
21. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan sebagai pedoman oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam menyusun Perubahan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
- KETIGA : Membebaskan biaya atas pelaksanaan kegiatan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 26 - 6 - 2025
BUPATI PASURUAN,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

TEMBUSAN :

1. Inspektur Daerah Kab. Pasuruan;
2. Kepala BPKPD Kab. Pasuruan;
3. Kepala Bappelitbangda Kab. Pasuruan;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 100.3.3.2/768 /HK/424.013/2025

TANGGAL : 26 - 6 - 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025

- I. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN;
- II. DINAS KESEHATAN;
- III. DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG;
- IV. DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI;
- V. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
- VI. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA;
- VII. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH;
- VIII. DINAS SOSIAL;
- IX. DINAS KETENAGAKERJAAN;
- X. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;
- XI. DINAS LINGKUNGAN HIDUP;
- XII. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL;
- XIII. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA;
- XIV. DINAS PERHUBUNGAN;
- XV. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;
- XVI. DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH;
- XVII. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU;
- XVIII. DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA;
- XIX. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN;
- XX. DINAS PERIKANAN;
- XXI. DINAS PARIWISATA;
- XXII. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN;
- XXIII. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN;
- XXIV. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN;
- XXV. SEKRETARIAT DAERAH;
- XXVI. SEKRETARIAT DPRD;
- XXVII. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH;
- XXVIII. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH;
- XXIX. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA;
- XXX. INSPEKTORAT DAERAH;
- XXXI. KECAMATAN BANGIL;
- XXXII. KECAMATAN BEJI;
- XXXIII. KECAMATAN GEMPOL;
- XXXIV. KECAMATAN GONDANG WETAN;
- XXXV. KECAMATAN GRATI;
- XXXVI. KECAMATAN KEJAYAN;
- XXXVII. KECAMATAN KRATON;
- XXXVIII. KECAMATAN LEKOK;
- XXXIX. KECAMATAN LUMBANG;

- XL. KECAMATAN NGULING;
- XLI. KECAMATAN PANDAAN;
- XLII. KECAMATAN PASREPAN;
- XLIII. KECAMATAN POHJENTREK;
- XLIV. KECAMATAN PRIGEN;
- XLV. KECAMATAN PURWODADI;
- XLVI. KECAMATAN PURWOSARI;
- XLVII. KECAMATAN PUSPO;
- XLVIII. KECAMATAN REJOSO;
- XLIX. KECAMATAN REMBANG;
- L. KECAMATAN SUKOREJO;
- LI. KECAMATAN TOSARI;
- LII. KECAMATAN TUTUR;
- LIII. KECAMATAN WINONGAN;
- LIV. KECAMATAN WONOREJO; DAN
- LV. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

XIX. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah. Salah satu dokumen perencanaan untuk mendukung keberhasilan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yaitu merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang mengacu pada RKPD.

Beberapa hal yang termuat dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah berupa tujuan, sasaran, program, kegiatan, pendanaan serta prakiraan pagu anggaran. Selain itu, penyusunan perubahan rencana kerja dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan PD sesuai tupoksinya.

Proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 didasarkan atas hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan tribulan II tahun 2025 yang diarahkan pada aspek-aspek pelayanan, pengelolaan dan pembinaan serta evaluasi pencapaian program dan menjawab tantangan isu-isu serta permasalahan yang berkembang. Selain itu dalam penyusunan Perubahan Renja berpedoman pada Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan 2024 - 2026.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan dilandasi oleh :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1945 tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
 19. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 20. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2025;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 29. Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 30. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 12);
 31. Perbup No 117 Tahun 2023 Tentang RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;

32. Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 117 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;
33. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 188 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 160 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan;
34. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024-2026;
35. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025;
36. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan dokumen perubahan Renja tahun 2025 adalah untuk dijadikan pedoman koordinasi lintas pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat serta menjamin terciptanya pembangunan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan dalam kurun waktu satu tahun ke depan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 adalah :

- a. Untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan;
- b. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan;
- c. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar komponen, mulai dari

saat penyusunan, penuangan dan penjabarannya ke dalam perubahan RKA;

- d. Sebagai alat untuk mengukur pencapaian target kinerja dalam kurun waktu satu tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

- 2.1 Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025 sampai triwulan II
- 2.2 Isu-Isu Aktual Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah
- 3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV : PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2025 SAMPAI TRIBULAN II DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PASURUAN

2.1 Evaluasi Hasil Rencana Kerja Tahun 2025 Sampai Tribulan II

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan tersebut mengamanatkan bahwa setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, sehingga Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 sampai tribulan II harus dilakukan evaluasi. Evaluasi tersebut meliputi kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Penyusunan perubahan rencana kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan 2025 memperhatikan:

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja sampai dengan bulan juni tribulan II Tahun 2025 sebagai nilai tambah dalam penyusunan perubahan Renja Tahun 2025;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta mengalokasikannya.

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan 2025 sampai dengan awal bulan juni tribulan II tahun 2025 yang disajikan pada tabel 2.1 Secara keseluruhan anggaran yang sudah terealisasi sebesar 28,71% atau Rp 2.250.965.871,- dari pagu anggaran Rp 8.013.11.744,- sedangkan nilai rata-rata capaian kinerja pada program sebesar 8,53%, rata-rata capaian kinerja pada kegiatan sebesar 5,23% dan rata-rata capaian

kinerja pada subkegiatan sebesar 3,36% dengan predikat keseluruhan nilai rata-rata capaian kinerja "sangat rendah". Hal ini disebabkan karena banyaknya subkegiatan yang belum dilaksanakan secara maksimal sampai dengan tribulan II ini. Adapaun faktor pendorong keberhasilan kinerja dan penghambat pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Faktor pendorong keberhasilan kinerja

- Adanya penambahan calon pegawai ASN PPPK fungsional baru baik pustakawan maupun arsiparis sebagai tenaga menunjang program/kegiatan baik di bidang perpustakaan maupun bidang kearsipan;
- Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, seperti perpustakaan daerah yang dilengkapi dengan ruang baca yang nyaman, akses internet dan koleksi buku bacaan terbaru yang diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan pengunjung;
- Pembinaan dan monitoring rutin yang memastikan arsiparis dan pustakawan terlatih dan kompeten dalam mengelola perpustakaan dan arsip guna memberikan layanan berkualitas;
- SOP dan sistem pelaksanaan kegiatan yang sudah terbentuk dan terbangun dengan baik;
- Meningkatkan koordinasi yang baik dengan stakeholder sehingga mampu membangun kerja sama dalam mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah;
- Adanya dokumen perencanaan dengan indikator kinerja yang terukur serta dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berkala;
- Tingginya komitmen antar pegawai untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
- Adanya penilaian kinerja PD setiap bulannya sehingga organisasi pemerintah daerah memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kinerja fisik dan keuangan pada masing-masing PD.

2. Faktor penghambat pencapaian kinerja

- Adanya regulasi Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 sehingga di triwulan I belum bisa melaksanakan kegiatan

dan harus mengubah rencana anggaran yang telah disusun sebelumnya;

- Keterbatasan dana/anggaran dapat membatasi perpustakaan dan arsip dalam mengembangkan koleksi, infrastruktur dan promosi;
- Rendahnya tanggung jawab dan komitmen berupa kesadaran akan pentingnya kearsipan di Perangkat Daerah dan masyarakat dalam mengelola arsip secara baku yang menyebabkan arsip menjadi kurang teratur dan sulit diakses;
- Pelayanan yang tidak responsif terhadap kebutuhan dan pertanyaan pemustaka, seperti kurangnya penjelasan yang jelas, bantuan yang tidak tepat waktu, atau kurangnya interaksi yang baik, dapat mengurangi kepuasan pemustaka dan mengurangi minat mereka untuk mengunjungi perpustakaan;
- Kurangnya promosi dan kerjasama tentang layanan, koleksi, dan program yang ditawarkan baik perpustakaan maupun kearsipan sehingga menyebabkan masyarakat atau pemustaka tidak menyadari keberadaan layanan yang bisa mereka manfaatkan;
- Perencanaan yang kurang matang yang disebabkan oleh kurangnya koordinasi dengan bidang;

3. Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan selanjutnya

- Percepatan kegiatan sehingga realisasi fisik dan anggaran bisa tercapai sesuai dengan perencanaan yang sudah ditentukan;
- Memperhatikan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan Anggaran Kas dan rencana aksi yang telah disusun;
- Memperhatikan lebih lanjut proses pengadaan barang/jasa sesuai norma peraturan perundangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan pengadaan;
- Meningkatkan koordinasi baik koordinasi secara internal perangkat daerah, koordinasi antar perangkat daerah maupun koordinasi dan konsultasi dengan Pemda dan Kementerian/Lembaga yang terkait;
- Setiap bidang perlu melakukan pengendalian internal secara tertib, termasuk dalam hal pengawalan terhadap capaian kinerja (fisik, keuangan, program, dan IKU) serta meningkatkan kualitas pelaporan dengan mengisi permasalahan dan tindak lanjut secara benar pada aplikasi simoneva.

Tabel 2.1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten
Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan
Periode Pelaksanaan : Tahun 2025

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten yang mengacu pada sasaran RKPD
IKU PD 1 : Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)
Target : 85,50
IKU PD 2 : Nilai Audit Kearsipan
Target : 79,00

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun n-1 (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2025 (%)		
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 x 100%		
				K Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatkan Kegemaran Membaca Masyarakat																									
	Meningkatnya Literasi Masyarakat dan Pengembangan Perpustakaan Inklusi Sosial	Bidang Urusan Perpustakaan																								
		1 Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pembinaan Perpustakaan Ber-NSP	3.47	%		3,248,032,347	3.09	%	2,018,112,650	0.5	13,959,200	1	183,352,000	0	-	0	-	1.5	197,311,200	48.544	9.78	1.5	197,311,200	43.2	0
			Persentase Perpustakaan yang Berbasis Inklusi Sosial	5.7	%		1,376,781,000	5.50	%	881,266,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
		1 Pengelolaan Perpustakaan tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perpustakaan yang Dibina dan Dikembangkan	100	%		850,885,000	100	%	206,393,000	0	-		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
			Persentase Peningkatan Koleksi Perpustakaan	100	%		896,982,960		100	%	259,830,550	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
			Persentase Peningkatan Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan yang sesuai Standar	100	%		363,297,000		100	%	241,514,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
			Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan	100	%		198,750,000		100	%	77,252,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
		1 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/ Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	120	Perpustakaan		405,000,000	300	Perpustakaan	112,636,500	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
		2 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/ Kota Sesuai Kewenangannya	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/ Kota Sesuai Kewenangannya	3	Perpustakaan		295,885,000	1	Perpustakaan	57,096,500	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
		3 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	75	Layanan		198,750,000	25	Layanan	77,252,000	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun n-1 (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2025 (%)							
							I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 12/7 x 100%	14 = 6+12	15 = 14/5 x 100%											
				K Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		4 Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	30 Perpustakaan	150,000,000			60 Perpustakaan	36,660,000	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	- .00	0	-	0	-
		5 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	300 Orang	206,325,000			200 Orang	210,696,000	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	- .00	0	-	0	-
		6 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	36 Dokumen	156,972,000			12 Dokumen	30,818,000	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	- .00	0	-	0	-
		7 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	8000 Eksemplar	651,982,960			2630 Eksemplar	207,238,050	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	- .00	0	-	0	-
		8 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	300 Eksemplar	245,000,000			200 Eksemplar	52,592,500	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	- .00	0	-	0	-
		2 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Kegiatan Pengembangan Minat Baca	100 %	539,051,387			100 %	1,146,717,100	5	13,959,200	20	183,352,000	0	-	0	-	25	197,311,200	25	17.21	25	197,311,200	25	0
			Persentase Literasi Berbasis Inklusi Sosial	100 %	1,376,781,000			100 %	881,266,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	- .00	0	-	0	-
			Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi	100 %	399,066,000			100 %	86,406,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	- .00	0	-	0	-
		1 Pemilihan Duta Baca/ Bunda Baca/ Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Duta Baca/ Bunda Baca/ Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	3 Orang	214,000,000			1 Orang	44,972,500	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	- .00	0	-	0	-
		2 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/ Kota yang dikembangkan	30 Perpustakaan	1,376,781,000			20 Perpustakaan	881,266,000	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	- .00	0	-	0	-
		3 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	18 Orang	185,066,000			6 Orang	41,433,500	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	- .00	0	-	0	-
		4 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	72 Lokus	539,051,387			24 Lokus	1,146,717,100	1	13,959,200	10	183,352,000	0	-	0	-	11	197,311,200	45.83	17.21	11	197,311,200	15.28	0
		2 Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Prosentase Koleksi Nasional dan naskah Kuno yang dilestarikan	20 %	506,270,000			20 %	61,910,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	- .00	0	-	0	-
		1 Pelestarian Naskah Kuno milik Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase Naskah Kuno yang dilestarikan	10 %	506,270,000			10 %	61,910,000	0	-	0	-			0	-	0	-	0	- .00	0	-	0	-
		1 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	72 Orang	231,850,000			50 Orang	19,010,000	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	- .00	0	-	0	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun n-1 (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2025 (%)	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 x 100%	
				K Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		2 Pengembangan , Pengolahan dan Pengalihmedia an Naska Kuno yang dimili oleh masyarakat untuk dilestarikan dan Di dayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	30 Eksemplar	274,420,000			1 Eksempl ar	42,900,000	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	- .00	0	-	0	-
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip																								
	Meningkatnya hasil pengawasan Kearsipan Perangkat Daerah	Bidang Urusan Kearsipan			25,668,772,879				7,374,277,519		1,302,444 ,394		751,210 ,277						2,053 ,654, 671				2,053,654,671		
		3 Program Pengelolaan Arsip	Persentase Peningkatan Arsip yang Dikelola, Dirawat dan Dilestarikan	40 %	1,766,592,000			35 %	386,853,500	0	-		77,199,500	0	-	0	-	0	77,19 9,500	0	19.96	0	77,199,500	0	0
		1 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Arsip Dnamis yang Dikelola dan Dirawat	75 %	601,150,000			70 %	107,283,000	0	-	25	77,199,500	0	-	0	-	25	77,19 9,500	35.714	71.96	25	77,199,500	33.33	0
		1 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	28965 Berkas	287,325,000			28965 Berkas	81,595,000	0	0	28965	77199500	0	-	0	-	28965	77,19 9,500	100	94.61	28965	77,199,500	100	0
		2 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota	198 Laporan	293,825,000			57 Laporan	10,091,000	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	- .00	0	-	0	-
		3 Penyelenggara an pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota	Jumlah OPD kabupaten/ kota dan BUMD kabupaten/ kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	57 Lembaga	20,000,000			57 Lembaga	15,597,000	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	- .00	0	-	0	-
		2 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Arsip Statis yang Dialah, Dirawat, dan Dilestarikan	18 %	299,795,000			6 %	59,547,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	- .00	0	-	0	-
		1 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	150 Arsip	299,795,000			20 Arsip	59,547,000	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	- .00	0	-	0	-
		3 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Melalui JIKN	3.60 %	865,647,000			3.30 %	220,023,500	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	- .00	0	-	0	-
		1 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/ kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Melalui JIKN	180 Pengguna	180,000,000			30 Penggun a	207,130,000	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	- .00	0	-	0	-
		2 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/ Kota	36 Laporan	685,647,000			12 Laporan	12,893,500	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	- .00	0	-	0	-
		4 Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Perlindungan dan penyelamatan Arsip Daerah	5.50 %	1,036,837,000			5.50 %	113,076,500	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	- .00	0	-	0	-
		1 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Persentase tingkat kegiatan pemusnahan arsip sesuai dengan NSPK	3.00 %	181,647,000			3 %	29,566,500	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	- .00	0	-	0	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun n-1 (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2025 (%)	
										I		II		III		IV									
										8		9		10		11									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 x 100%	
				K Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		1 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	360 Berkas	76,647,000			67 Berkas	20,217,500	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	- .00	0	-	0	-
		2 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	30 Arsip	105,000,000			25 Arsip	9,349,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	- .00	0	-	0	-
		2 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/ Kota	Persentase Arsip yang Dievakuasi, Diidentifikasi, dipulihkan dan disimpan Akibat Bencana	1.30 %	150,000,000			1.00 %	35,516,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	- .00	0	-	0	-
		1 Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	30 Arsip	75,000,000			10 Arsip	24,092,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	- .00	0	-	0	-
		2 Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	30 Arsip	75,000,000			10 Arsip	11,424,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	- .00	0	-	0	-
		3 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Digabung dan/ atau Dibubarkan dan Pamekaran Daerah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan	Persentase tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah kabupaten yang digabung dan/ atau dibubarka dan pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan dengan NSPK	1.00 %	224,190,000			1.00 %	9,428,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	- .00	0	-	0	-
		1 Pendataan, Penyusunan daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah kabupaten/ Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	30 Daftar	107,250,000			10 Daftar	4,714,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	- .00	0	-	0	-
		2 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	10 Arsip	116,940,000			10 Arsip	4,714,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	- .00	0	-	0	-
		4 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/ Kota	Persentase Jumlah Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dinilai dan ditetapkan sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	2.00 %	216,000,000			2.00 %	26,547,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	- .00	0	-	0	-
		1 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentistas Arsip Sesuai Perayaran Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	30 Arsip	141,000,000			10 Arsip	11,357,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	- .00	0	-	0	-
		2 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	30 Arsip	75,000,000			10 Arsip	15,190,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	- .00	0	-	0	-

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun n-1 (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2025 (%)	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 x 100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Arsip																							
		5 Pencarian Arsip Statis Kabupaten/ Kota yang dinyatakan Hilang	Persentase Pencarian Arsip Statis Kabupaten/ Kota yang dinyatakan Hilang	3.00	%		265,000,000	3.00	%	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
		1 Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	30	Arsip		265,000,000	5	Arsip	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	100	%		22,865,343,879	100	%	25	1,302,444,394	10	674,010,777	0	-	0	-	35	1,976,455,171	35	28.75	35	1,976,455,171	35	0
		1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%		443,434,000	100	%		4,460,000	0	-	0	-	0	-	0	4,460,000	0	6.68	0	4,460,000	0	0
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18	Dokumen		167,331,000	8	Dokumen		4,460,000	0	-	0	-	0	-	0	4,460,000	0	22.06	0	4,460,000	0	0
		2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36	Laporan		276,103,000	8	Laporan		0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
		2 Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100	%		16,118,519,697	100	%	25	1,164,172,279	10	607,171,152	0	-	0	-	35	1,771,343,431	35	30.20	35	1,771,343,431	35	0
		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29	Orang/Bulan		12,868,519,697	29	Orang/Bulan	29	962,964,229	29	#####	0	-	0	-	29	1,444,736,681	29	27.25	29	1,444,736,681	29	0
		2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36	Dokumen		3,250,000,000	12	Dokumen	3	201,208,050	1	125,398,700	0	-	0	-	4	326,606,750	33.33	57.86	4	326,606,750	11.11	0
		3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	100	%		2,226,345,960	100	%	25	48,798,407	25	11,022,400	0	-	0	-	50	59,820,807	50	18.91	50	59,820,807	50	0
		1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket		115,000,000	7	Paket		0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
		2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21	Paket		279,345,960	21	Paket	1	1,000,000	0	-	0	-	0	-	1	1,000,000	4.76	5.81	1	1,000,000	4.762	0
		3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket		348,000,000	45	Paket	1	3,824,000	2	2,938,000	0	-	0	-	3	6,762,000	6.67	12.29	3	6,762,000	25	0
		4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan yang Disediakan	9	Paket		163,000,000	18	Paket	2	3,268,150	0	-	0	-	0	-	2	3,268,150	11.11	13.68	2	3,268,150	22.22	0
		5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24	Dokumen		251,000,000	8	Dokumen	2	5,246,000	2	4,758,000	0	-	0	-	4	10,004,000	50.00	22.13	4	10,004,000	16.67	0
		6 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	36	Laporan		115,000,000	12	Laporan	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
		7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	Laporan		955,000,000	24	Laporan	4	35,460,257	10	3,326,400	0	-	0	-	14	38,786,657	58.33	25.23	14	38,786,657	19.44	0

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun n-1 (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2025 (%)	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 12/7 x 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 x 100%	
				K Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan barang milik daerah	100	%		1,079,000,000	100	%		68,259,000	0	-	0	-			0	-	0	-	0	-	0	-
		1 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30	Unit		294,000,000	23	Unit		50,707,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
		2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40	Unit		785,000,000	2	Unit		17,552,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
		5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	prosentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%		1,524,500,000	100	%		311,352,876	25	68,644,908	25	13,483,625	0	-	0	-	50	82,128,533	50	26.38	50	82,128,533
		1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan		1,524,500,000	12	Laporan		311,352,876	3	68,644,908	3	13,483,625	0	-	0	-	6	82,128,533	50	26.38	6	82,128,533
		6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pmenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan	100	%		1,473,544,222	100	%		245,708,100	25	16,368,800	25	42,333,600	0	-	0	-	50	58,702,400	50	23.89	50	58,702,400
		1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	72	Unit		1,229,000,000	20	Unit		213,857,100	2	16,368,800	4	39,983,600	0	-	0	-	6	56,352,400	30	26.35	6	56,352,400
		3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	105	Unit		244,544,222	30	Unit		31,851,000	0	0	5	2,350,000	0	-	0	-	5	2,350,000	16.6667	7.38	5	2,350,000
			JUMLAH ANGGARAN								10,335,566,169		1,316,403,594		934,562,277						2,250,965,871		21.78	0	
																				13.92					
																				Sangat Rendah					
																				11.17					
																				Sangat Rendah					
																				9.02					
																				Sangat Rendah					
		Faktor pendorong keberhasilan kinerja :	1. Dokumen perencanaan dengan indikator kinerja yang terukur 2. Meningkatkan koordinasi yang baik dengan stakeholder																						
		Faktor penghambat pencapaian kinerja :	Adanya regulasi Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 sehingga di triwulan I belum bisa melaksnakan kegiatan dan harus mengubah rencana anggaran yang telah disusun																						
		Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :	1. Percepatan kegiatan sehingga realisasi fisik dan anggaran bisa tercapai sesuai dengan perencanaan yang sudah dilakukan. 2. Memperhatikan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan Anggaran Kas dan rencana aksi yang telah disusun. 3. Memperhatikan lebih lanjut proses pengadaan barang/jasa sesuai norma peraturan perundangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan pengadaan																						
		Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja berikutnya :	...																						

2.2 Isu – Isu Aktual Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dengan diterbitkannya regulasi Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, secara langsung akan berdampak secara signifikan pada operasional kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan terutama pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien dan profesional.

Isu – isu aktual dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:

- a. Pengurangan belanja seremonial, Inpres No. 1 tahun 2025 membatasi anggaran untuk kegiatan seremonial sehingga kegiatan berupa sosialisasi dan bimbingan teknik untuk tahun ini diubah dari metode luring menjadi daring/zoom meeting.
- b. Inpres ini mendorong efisiensi penggunaan anggaran dengan mengurangi belanja yang tidak produktif, sehingga dana yang dialokasikan bias lebih difokuskan pada program prioritas Bupati terpilih.
- c. Pengadaan sarana dan prasarana baik bidang perpustakaan maupun bidang kearsipan mengalami pemangkasan yang signifikan, seperti belanja modal asset tetap lainnya berupa pengadaan buku dari pagu awal Rp 207.238.050,- berkurang menjadi Rp 71.256.550,- sedangkan belanja modal peralatan dan mesin berupa pengadaan LCD proyektor, meja dan kursi rapat ditiadakan dan dialihkan ke pengadaan laptop untuk kebutuhan operasional administrasi kantor.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah

Sesuai dengan keselarasan (cascading) tujuan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan 2024 - 2026, untuk urusan perpustakaan mengacu pada tujuan Pemerintah Kabupaten yang kedua yaitu “Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat” dengan sasaran meningkatnya kualitas pembangunan manusia. Sedangkan untuk urusan kearsipan mengacu pada tujuan Pemerintah Kabupaten yang ketiga yaitu “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Dinamis dan Pelayanan Prima Berbasis Teknologi Informasi: dengan sasaran meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat sasaran dan target sasaran sesuai dengan tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 beserta indikatornya sebagaimana tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Perubahan Target IKU/SPM/IKK Tahun 2025

No	RPD 2024-2026	Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026	IKU/SPM/IKK	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025		Ket
						Awal	Perubahan	
1		2	3	4	5	6	7	8
1	Tujuan I : Meningkatnya Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat	Tujuan PD I : Meningkatnya kegemaran Membaca Masyarakat						
	Indikator : Persentase Penduduk Miskin	Indikator : Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)	IKU/IKK	Nilai	74,33	85,50	-	
	Sasaran I : Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia	Sasaran PD : 1. Meningkatnya Literasi Masyarakat dan pengembangan perpustakaan inklusi sosial						
	Indikator Sasaran : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indikator Sasaran :						
		Indeks Pembangunan Literasi masyarakat (IPLM)	IKU/IKK	Indeks	12,51	12,75	-	
		Persentase Pertumbuhan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	IKU	Persen	10,00	12,50	-	
2	Tujuan 2 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis dan Pelayanan Prima Berbasis Teknologi Informasi	Tujuan PD 2 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip						
	Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi	Indikator : Nilai Audit Kearsipan	IKU	Nilai	78,77	79,00	-	
	Sasaran I : Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	Sasaran PD : 2.1. Meningkatnya hasil pengawasan Kearsipan Perangkat Daerah						
	Indikator Sasaran : Nilai SAKIP	Indikator Sasaran : Persentase perangkat daerah yang melakukan	IKU	Persen	14,70	22,05	-	

		pengelolaan kearsipan secara Baku						
		Sasaran PD : 2.2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah						
		Indikator Sasaran : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	IKU	Nilai	80,50	81,00	-	
		UP Bidang Kearsipan						
		Tingkat Ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	IKK		100	100	-	
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	IKK		45,53	45,75	-	

3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Perubahan rencana kerja (renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan tahun 2025 menitikberatkan pada prioritas pembangunan daerah yaitu peningkatan kualitas dan akses pelayanan dasar masyarakat dengan penyelenggaraan 33 (tiga puluh tiga) program prioritas Bupati Pasuruan terpilih adalah:

1. Beasiswa untuk untuk santri/ siswa berprestasi, olahragawan/ pemuda berprestasi serta beasiswa untuk anak yatim dan anak tidak mampu.
2. Klinik kesehatan/ Ambulans untuk pondok pesantren;
3. Santripreneur/wirausahawan baru dan hibah produktif berbasis pondok pesantren;
4. Dukungan Pembangunan dan Operasional Rumah Sakit Nahdlatul Ulama (RSNU);
5. Bantuan kelembagaan untuk Ormas, pondok pesantren, sekolah keagamaan, dan tempat ibadah;
6. Peningkatan kesejahteraan pendidik baik formal maupun non formal;
7. Peningkatan kualitas sarana prasarana, akses serta kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pendidikan dan kesehatan.
8. Peningkatan layanan UHC dan ambulance gratis di semua tingkatan pelayanan kesehatan.
9. Perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat rentan (Orang Lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat/disabilitas) serta peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah.
10. Merdeka Pupuk, Petani Milenial, Eco Farming dan Pengembangan teknologi pertanian untuk petani.
11. Penataan kawasan kumuh/ kawasan nelayan dan pembangunan Infrastruktur pendukung (tambatan perahu, tangkis laut, dan sarana pendukung lainnya) untuk petani tambak dan nelayan.
12. IPAL komunal, Bio gas dan mandiri pakan untuk peternak.
13. Peningkatan Infrastruktur jalan menuju pusat-pusat produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta dukungan infrastruktur menuju daerah wisata
14. Pembangunan/pengadaan sarana pendukung dalam rangka mengatasi banjir yang terintegrasi dari hulu sampai hilir.

15. Pencarian sumber mata air baru dan pipanisasi air bersih (PPAB) untuk mengatasi kebutuhan air bersih di daerah kekurangan air.
16. Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk Desa secara merata.
17. Peningkatan kesejahteraan ASN dan Aparatur Pemerintahan Desa (Perangkat Desa, RT/RW, Kader Desa, Linmas dan BPD).
18. Penciptaan Lapangan Kerja baru dengan memprioritaskan tenaga kerja asli pasuruan.
19. Kemudahan Perizinan berusaha dan menjaga hubungan industrial yang harmonis dan saling menguntungkan.
20. Pengembangan Pusat lembaga sertifikasi profesi berbasis kebutuhan dunia kerja baik nasional maupun internasional.
21. Pembangunan Pasuruan Coaching and Creativity (Pusat pelatihan dan kreatifitas) dalam rangka pengembangan kreatifitas anak muda, optimalisasi ekonomi kreatif dan sertifikasi produk Unggulan/produk UMKM.
22. Usaha mikro kecil naik kelas berbasis potensi keunggulan daerah.
23. Fasilitasi Temu usaha dan sinergi pola kemitraan antara dunia Industri dengan kelompok ekonomi masyarakat (Kelompok tani, kelompok ternak, kelompok nelayan) dan BUMDES.
24. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan/atau taman bermain di tingkat kecamatan.
25. 1 (Satu) Kecamatan 1(satu) Sekolah olahraga/ sepak bola.
26. Persekabpas Naik Kelas.
27. Penataan Kawasan Ibukota Bangil.
28. Revitalisasi Pasar Tradisional.
29. Islamic Centre dan perpustakaan daerah yang representatif.
30. Pengembangan, perlindungan dan pelestarian seni budaya berbasis kearifan lokal.
31. Pembangunan Jalan poros kabupaten dengan standart Hotmix/Cor.
32. Optimalisasi peran organisasi pengusaha dan serikat pekerja/buruh untuk perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh.
33. Digitalisasi layanan publik, Pengembangan Pasuruan satu data dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Dari 33 (tiga puluh tiga) program prioritas Bupati Pasuruan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan mengemban program prioritas *islamic center* dan perpustakaan daerah yang

representative. Program ini diampu melalui program pembinaan perpustakaan dengan sub kegiatan sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat. Berikut penyajian tabel 3.2 terkait program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung prioritas pembangunan daerah dan 33 program prioritas Bupati.

Tabel 3.2
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025	33 Program Prioritas Bupati	PROGRAM/KEGIAT AN/ SUB KEGIATAN BAB V RKPD TAHUN 2025	PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN BERDASARKAN PEMETAAN SIPD TAHUN 2025	PAGU ANGGARAN		TARGET INDIKATOR KINERJA		REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN 2		CATATAN
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	KINERJA	ANGGARAN	
1	Peningkatan kualitas dan akses pelayanan dasar masyarakat	Islamic center dan perpustakaan daerah yang representative	Program Pembinaan Perpustakaan/ Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota /Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan/ Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota /Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	1.146.717.100	777.697.850	24 Lokus	24 Lokus	11	197.311.200	Dilaksanakan pada triwulan III

Berdasarkan hasil evaluasi renja sampai dengan tribulan II Tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan terdapat perubahan anggaran, hal tersebut dilakukan guna mengefektifkan penghematan belanja tahun 2025. Selanjutnya perubahan tersebut meliputi pengurangan pagu indikatif pada program, kegiatan dan sub kegiatan. Rencana kerja dan pendanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3
Tabel Perubahan Rencana Kerja
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025

Kabupaten : Pasuruan
Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	RENJA 2025				DPA 2025		P- RENJA 2025				SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK	PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP		TARGET IK	PAGU RP	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=12-8	16=13-9	17
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR														
	Urusan Bidang Perpustakaan														
		1 Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pembinaan Perpustakaan Ber-NSP	3.09 %	693,861,000	3.09 %	2,018,112,650	1 Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pembinaan Perpustakaan Ber-NSP	3.09 %	1,139,129,900	DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Pendidikan	0 %	- 878,982,750	
			Persentase Perpustakaan yang Berbasis Inklusi Sosial	5.50 %	1,156,075,000	5.50 %	881,266,000		Persentase Perpustakaan yang Berbasis Inklusi Sosial	5.50 %	650,416,000	DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Pendidikan	0 %	- 230,850,000	
		1 Pengelolaan Perpustakaan tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perpustakaan yang Dibina dan Dikembangkan	100 %	328,844,500	100 %	206,393,000	1 Pengelolaan Perpustakaan tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perpustakaan yang Dibina dan Dikembangkan	100 %	133,502,000	DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Pendidikan	0 %	- 72,891,000	
			Persentase Peningkatan Koleksi Perpustakaan	100 %	37,282,500	100 %	259,830,550		Persentase Peningkatan Koleksi Perpustakaan	100 %	93,916,550	DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Pendidikan	0 %	- 165,914,000	
			Persentase Peningkatan Pustakawan danTenaga Teknis Perpustakaan yang sesuai Standart	100 %	118,001,000	100 %	241,514,000		Persentase Peningkatan Pustakawan danTenaga Teknis Perpustakaan yang sesuai Standart	100 %	29,210,000	DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Pendidikan	0 %	- 212,304,000	
			Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan	100 %	20,818,000	100 %	77,252,000		Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan	100 %	18,510,000	DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Pendidikan	0 %	- 58,742,000	

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	RENJA 2025				DPA 2025		P- RENJA 2025				SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK	PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP		TARGET IK	PAGU RP	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=12-8	16=13-9	17
		1 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan di Seluruh Wilayah Kabupaten/ Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	40 Perpustakaan	126,886,500	300 Perpustakaan	112,636,500	1 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan di Seluruh Wilayah Kabupaten/ Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	30 Perpustakaan	39,745,500	DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Pendidikan	-270 Perpustakaan	- 72,891,000	Pembinaan pada perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di khususnya yang belum ber SNP
		2 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/ Kota Sesuai Kewenangannya	1 Perpustakaan	132,143,000	1 Perpustakaan	57,096,500	2 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/ Kota Sesuai Kewenangannya	1 Perpustakaan	57,096,500	DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Pendidikan	0 Perpustakaan	-	
		3 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	25 Layanan	20,818,000	25 Layanan	77,252,000	3 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	20 Layanan	18,510,000	DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Pendidikan	-5 Layanan	- 58,742,000	Layanan Perpustakaan rujukan tahun ini hanya berupa TBM (Taman Baca Masyarakat), Pojok Baca Masyarakat, Rumah Baca, Laboratorium Baca dan Ruang Baca
		4 Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/ Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	10 Perpustakaan	69,815,000	60 Perpustakaan	36,660,000	4 Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/ Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	40 Perpustakaan	36,660,000	DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Pendidikan	-20 Perpustakaan	-	

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ UNSUR	RENJA 2025				DPA 2025		P- RENJA 2025				SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK	PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP		TARGET IK	PAGU RP	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=12-8	16=13-9	17
		5 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Orang	88,033,000	200 Orang	210,696,000	5 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0 Orang	-	DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Pendidikan	-200 Orang	- 210,696,000	Pembinaan dan peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dilaksanakan secara online
		6 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan	12 Dokumen	29,968,000	12 Dokumen	30,818,000	6 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan	12 Dokumen	29,210,000	DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Pendidikan	0 Dokumen	- 1,608,000	Penyusunan data dan informasi tetap dilaksanakan hanya kebutuhan ATK yang berkurang
		7 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	3000 Eksemplar	13,290,000	2630 Eksemplar	207,238,050	7 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	898 Eksemplar	71,256,550	DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Pendidikan	-1732 Eksemplar	- 135,981,500	Pengadaan buku tetap dilaksanakan hanya sebaran volume yang berkurang
		8 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	100 Eksemplar	23,992,500	200 Eksemplar	52,592,500	8 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	10 Eksemplar	22,660,000	DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Pendidikan	-190 Eksemplar	- 29,932,500	Cetak buku terkait kekhasan koleksi perpustakaan daerah dianggarkan kembali tahun depan dan digantikan dengan kegiatan sosialisasi untuk para pustakawan tentang penggalan kekhasan koleksi daerah
		2 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Kegiatan Pengembangan Minat Baca	100 %	138,380,000	100 %	1,146,717,100	2 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Kegiatan Pengembangan Minat Baca	100 %	777,585,350	DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Pendidikan	0 %	- 369,131,750	
			Persentase Literasi Berbasis Inklusi Sosial	5.50 %	1,156,075,000	100 %	881,266,000		Persentase Literasi Berbasis Inklusi Sosial	100 %	650,416,000	DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Pendidikan	0 %	- 230,850,000	

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	RENJA 2025				DPA 2025		P- RENJA 2025				SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK	PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP		TARGET IK	PAGU RP	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=12-8	16=13-9	17
			Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi	0.23 %	50,535,000	100 %	86,406,000		Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi	100 %	86,406,000	DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Pendidikan	0 %	-	
		1 Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	1 Orang	18,883,500	1 Orang	44,972,500	1 Pilih an Duta Baca/B unda Baca/B unda Literasi Tingkat Daerah Kabupa ten/Kot a	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	1 Orang	44,972,500	DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Pendidikan	0 Orang	-	
		2 Pengembangan Literasi BerbasisInklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	10 Perpustakaan	1,156,075,000	20 Perpustakaan	881,266,000	2 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	18 Perpustakaan	650,416,000	DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Pendidikan	-2 Perpustakaan	- 230,850,000	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten tetap dilaksanakan namun jumlah perpustakaan yang dikembangkan berkurang dari jumlah rencana awal
		3 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Kabupaten Kota	6 Orang	31,651,500	6 Orang	41,433,500	3 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Kabupaten Kota	6 Orang	41,433,500	DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Pendidikan	0 Orang	-	

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	RENJA 2025				DPA 2025		P- RENJA 2025				SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK	PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP		TARGET IK	PAGU RP	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=12-8	16=13-9	17
		4 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	24 Lokus	138,380,000	24 Lokus	1,146,717,100	4 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	60 Lokus	777,585,350	DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Pendidikan	36 Lokus	- 369,131,750	Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat tetap dilaksanakan diseluruh Kabupaten Pasuruan namun jumlah peserta berkurang dari yang direncanakan diawal
														-	
		2 Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Prosentase Koleksi Nasional dan naskah Kuno yang dilestarikan	20 %	61,360,000	20 %	61,910,000	2 Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Prosentase Koleksi Nasional dan naskah Kuno yang dilestarikan	20 %	19,010,000		0 %	- 42,900,000	
		1 Pelestarian Naskah Kuno milik Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase Naskah Kuno yang dilestarikan	10 %	61,360,000	10 %	61,910,000	1 Pelestarian Naskah Kuno milik Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase Naskah Kuno yang dilestarikan	10 %	19,010,000		0 %	- 42,900,000	
		1 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	72 Orang	18,460,000	50 Orang	19,010,000	1 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	50 Orang	19,010,000	DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Pendidikan	0 Orang	-	

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ UNSUR	RENJA 2025				DPA 2025		P- RENJA 2025				SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK	PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP		TARGET IK	PAGU RP	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=12-8	16=13-9	17
		2 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naska Kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	30 Eksemplar	42,900,000	1 Eksemplar	42,900,000	2 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naska Kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	0 Eksemplar	-	DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Pendidikan	-1 Eksemplar	- 42,900,000	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naska Kuno akan dianggarkan kembali pada tahun selanjutnya
	Bidang Urusan Kearsipan	3 Program Pengelolaan Arsip	Persentase Peningkatan Arsip yang Dikelola, Dirawat dan Dilestarikan	35 %	186,093,500	35 %	386,853,500	3 Program Pengelolaan Arsip	Persentase Peningkatan Arsip yang Dikelola, Dirawat dan Dilestarikan	35 %	345,816,000	DAU	0 %	- 41,037,500	
		1 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Arsip Dinamis yang Dikelola dan Dirawat	70 %	106,543,000	70 %	107,283,000	1 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Arsip Dinamis yang Dikelola dan Dirawat	70 %	91,686,000	DAU	0 %	- 15,597,000	
		1 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	28965 Berkas	81,595,000	28965 Berkas	81,595,000	1 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	28965 Berkas	81,595,000	DAU	0 Berkas	-	
		2 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota	66 Laporan	11,601,000	57 Laporan	10,091,000	2 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota	57 Laporan	10,091,000	DAU	0 Laporan	-	
		3 Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota	Jumlah OPD kabupaten/ kota dan BUMD kabupaten/ kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	57 Lembaga	13,347,000	57 Lembaga	15,597,000	3 Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota	Jumlah OPD kabupaten/ kota dan BUMD kabupaten/ kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	0 Lembaga	-	DAU	-57 Lembaga	- 15,597,000	Kegiatan ini dapat digabungkan pada Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	RENJA 2025				DPA 2025		P- RENJA 2025				SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK	PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP		TARGET IK	PAGU RP	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=12-8	16=13-9	17
		2 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Arsip Statis yang Diolah, Dirawat, dan Dilestarikan	6 %	59,547,000	6 %	59,547,000	2 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Arsip Statis yang Diolah, Dirawat, dan Dilestarikan	6 %	47,000,000	DAU	0 %	- 12,547,000	
		1 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	30 Arsip	59,547,000	20 Arsip	59,547,000	1 Akuisisi, Pengola han, Preserv asi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	20 Arsip	47,000,000	DAU	0 Arsip	- 12,547,000	
		3 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Melalui JIKN	3.30 %	20,003,500	3.30 %	220,023,500	3 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Melalui JIKN	3.30 %	207,130,000	DAU	0 %	- 12,893,500	
		1 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Melalui JIKN	30 Pengguna	6,710,000	30 Pengg una	207,130,000	1 Penyedi aan Informa si, Akses dan Layana n Kearsip an Tingkat Daerah kab/kot a Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Melalui JIKN	30 Pengg una	207,130,000	DAU	0 Pengguna	-	
		2 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/ Kota	12 Laporan	13,293,500	12 Lapora n	12,893,500	2 Pember dayaan Kapasit as Unit Kearsip an dan Lembaga Kearsip an Daerah Kab/ Ko ta	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/ Kota	0 Lapora n	-	DAU	-12 Laporan	- 12,893,500	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah tetap dilaksanakan dengan metode daring
														-	

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	RENJA 2025				DPA 2025		P- RENJA 2025				SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK	PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP		TARGET IK	PAGU RP	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=12-8	16=13-9	17
		4 Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Perlindungan dan penyelamatan Arsip Daerah	5.50 %	113,816,500	5.50 %	113,076,500	4 Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Perlindungan dan penyelamatan Arsip Daerah	5.50 %	11,990,000		0 %	- 101,086,500	
		1 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Persentase tingkat kegiatan pemusnahan arsip sesuai dengan NSPK	3 %	29,566,500	3 %	29,566,500	1 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/ K ota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Persentase tingkat kegiatan pemusnahan arsip sesuai dengan NSPK	0 %	-		-3 %	- 29,566,500	
		1 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	67 Berkas	20,217,500	67 Berkas	20,217,500	1 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	0 Berkas	-	DAU	-67 Berkas	- 20,217,500	Dianggarkan pada tahun selanjutnya
		2 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	25 Arsip	9,349,000	25 Arsip	9,349,000	2 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	0 Arsip	-	DAU	-25 Arsip	- 9,349,000	Dianggarkan pada tahun selanjutnya
														-	
		2 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/ Kota	Persentase Arsip yang Dievakuasi, Dididentifikasi, dipulihkan dan disimpan Akibat Bencana	1.00 %	35,516,000	1.00 %	35,516,000	2 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/ K ota	Persentase Arsip yang Dievakuasi, Dididentifikasi, dipulihkan dan disimpan Akibat Bencana	1.00 %	11,990,000	DAU	0 %	- 23,526,000	

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ UNSUR	RENJA 2025				DPA 2025		P- RENJA 2025				SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK	PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP		TARGET IK	PAGU RP	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=12-8	16=13-9	17
		1 Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	10 Arsip	24,092,000	10 Arsip	24,092,000	1 Evakua si dan Identifi kasi Arsip Akibat Bencan a	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	10 Arsip	11,990,000	DAU	0 Arsip	- 12,102,000	Dianggarkan pada tahun selanjutnya
		2 Pemulihan dan Penyimpana n Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	10 Arsip	11,424,000	10 Arsip	11,424,000	2 Pemulih an dan Penyim panan Arsip Akibat Bencan a	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	0 Arsip	-	DAU	-10 Arsip	- 11,424,000	Dianggarkan pada tahun selanjutnya
		3 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Digabung dan/ atau Dibubarkan dan Pamekaran Daerah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan	Persentase tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah kabupaten yang digabung dan/ atau dibubarka dan pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan dengan NSPK	1.00 %	9,428,000	1.00 %	9,428,000	3 Penyelamata n Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/ K ota yang Digabung dan/ atau Dibubarkan dan Pamekaran Daerah Kecamatan dan Desa/ Kelura han	Persentase tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah kabupaten yang digabung dan/ atau dibubarka dan pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan dengan NSPK	0.00 %	-	DAU	-1.00 %	- 9,428,000	
		1 Pendataan, Penyusuna n daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnaha n Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah kabupaten/ Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	10 Daftar	4,714,000	10 Daftar	4,714,000	1 Pendata an, Penyus unan daftar dan Penilaian serta Penyera han atau Pemusnahan Arsip Bagi Pengga bungan Perangkat Daerah kabupa ten/ Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	0 Daftar	-	DAU	-10 Daftar	- 4,714,000	Dianggarkan pada tahun selanjutnya

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	RENJA 2025				DPA 2025		P- RENJA 2025				SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK	PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP		TARGET IK	PAGU RP	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=12-8	16=13-9	17
		2 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	10 Arsip	4,714,000	10 Arsip	4,714,000	2 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	0 Arsip	-	DAU	-10 Arsip	- 4,714,000	Dianggarkan pada tahun selanjutnya
														-	
		4 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/ Kota	Persentase Jumlah Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dinilai dan ditetapkan sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	2.00 %	27,287,000	2.00 %	26,547,000	4 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/ Kota	Persentase Jumlah Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dinilai dan ditetapkan sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	0.00 %	-	DAU	0.00 %	- 26,547,000	
		1 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	10 Arsip	11,357,000	10 Arsip	11,357,000	1 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	0 Arsip	-	DAU	-10 Arsip	- 11,357,000	Dianggarkan pada tahun selanjutnya
		2 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	10 Arsip	15,930,000	10 Arsip	15,190,000	2 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	0 Arsip	-	DAU	-10 Arsip	- 15,190,000	Dianggarkan pada tahun selanjutnya

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	RENJA 2025				DPA 2025		P- RENJA 2025				SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK	PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP		TARGET IK	PAGU RP	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=12-8	16=13-9	17
		5 Pencarian Arsip Statis Kabupaten/ Kota yang dinyatakan Hilang	Persentase Pencarian Arsip Statis Kabupaten/ Kota yang dinyatakan Hilang	3.00 %	12,019,000	3.00 %	12,019,000	5 Pencarian Arsip Statis Kabupaten/ Kota yang dinyatakan Hilang	Persentase Pencarian Arsip Statis Kabupaten/ Kota yang dinyatakan Hilang	0.00 %	-	DAU	-3.00 %	- 12,019,000	
		1 Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	5 Arsip	12,019,000	5 Arsip	12,019,000	1 Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	0 Arsip	-	DAU	-5 Arsip	- 12,019,000	Dianggarkan pada tahun selanjutnya
		5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	100 %	#####	100 %	6,874,347,519	5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	100 %	5,846,751,844	DAU	0 %	- 1,027,595,675	
		1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	65,726,000	100 %	66,801,000	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	63,150,000	DAU	0 %	- 3,651,000	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	19,791,000	8 Dokumen	20,216,000	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	16,565,000	DAU	0 Dokumen	- 3,651,000	Forum lintas perangkat daerah sudah dilaksanakan dan menyesuaikan jumlah narasumber yang hadir saat pelaksanaan
		2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	45,935,000	8 Laporan	46,585,000	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	46,585,000	DAU	0 Laporan	-	

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ UNSUR	RENJA 2025				DPA 2025		P- RENJA 2025				SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK	PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP		TARGET IK	PAGU RP	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=12-8	16=13-9	17
		2 Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	5,688,707,413	100 %	5,865,881,063	2 Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	4,916,949,388	DAU	0 %	- 948,931,675	
		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/ Bulan	5,163,591,729	29 Orang / Bulan	5,301,355,379	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang / Bulan	4,178,235,888	DAU	0 Orang/ Bulan	- 1,123,119,491	Disesuaikan dengan jumlah pegawai yang ada saat ini
		2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	525,115,684	12 Dokumen	564,525,684	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	738,713,500	DAU	0 Dokumen	174,187,816	Penyesuaian kenaikan iuran BPJS tenaga PTT
		3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	100 %	322,897,980	100 %	316,345,480	3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	100 %	225,748,980	DAU	0 %	- 90,596,500	
		1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	11,404,000	7 Paket	11,404,000	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	11,404,000	DAU	0 Paket	-	
		2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 Paket	33,623,980	21 Paket	17,224,480	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21 Paket	17,224,480	DAU	0 Paket	-	
		3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	55,384,300	45 Paket	55,005,300	3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	45 Paket	40,884,800	DAU	0 Paket	- 14,120,500	Bahan logistik kantor masih disediakan namun mengurangi jumlah/ volume
		4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan penggandaan yang Disediakan	3 Paket	17,505,200	18 Paket	23,891,200	4 Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan penggandaan yang Disediakan	18 Paket	15,707,200	DAU	0 Paket	- 8,184,000	Tetap dilaksanakan pengadaan barang cetakan namun beberapa volume dari item barang yang berkurang

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/UNSUR	RENJA 2025				DPA 2025		P- RENJA 2025				SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK	PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP		TARGET IK	PAGU RP	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=12-8	16=13-9	17
		5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen	45,200,000	8 Dokumen	45,200,000	5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen	45,200,000	DAU	0 Dokumen	-	
		6 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	9,900,000	12 Laporan	9,900,000	6 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	4,950,000	DAU	0 Laporan	- 4,950,000	Penyesuaian jumlah tamu yang ada dari pengalaman tahun sebelumnya
		7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	149,880,500	24 Laporan	153,720,500	7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	90,378,500	DAU	0 Laporan	- 63,342,000	Diperuntukkan hanya untuk perjalanan dinas yang bersifat urgent
		4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan barang milik daerah	100 %	40,276,000	100 %	68,259,000	4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan barang milik daerah	100 %	67,700,000	DAU	0 %	- 559,000	
		1 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	36,490,000	23 Unit	50,707,000	1 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	17 Unit	19,030,000	DAU	-6 Unit	- 31,677,000	Meja rapat tidak dianggarkan kembali disebabkan ruangan diambil alih oleh dinas/ bagian lainnya
		2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	3,786,000	2 Unit	17,552,000	2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	48,670,000	DAU	4 Unit	31,118,000	Penambahan pembelian laptop karena adanya penambahan jumlah calon PPPK
		5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	prosentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	378,831,276	100 %	311,352,876	5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	prosentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	311,352,876	DAU	0 %	-	

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ UNSUR	RENJA 2025				DPA 2025		P- RENJA 2025				SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP	TARGET IK	PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARGET IK	PAGU RP		TARGET IK	PAGU RP	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=12-8	16=13-9	17
		1 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	378,831,276	12 Lapora n	311,352,876	1 Penyedi aan Jasa Komuni kasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lapora n	311,352,876	DAU	0 Laporan	-	
														-	
		6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan	100 %	209,063,500	100 %	245,708,100	6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan	100 %	261,850,600	DAU	0 %	16,142,500	
		1 Penyediaan Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	183,973,100	20 Unit	213,857,100	1 Penyedi aan Jasa Pemelih araan, Biaya Pemelih araan dan Pajak Kendar aan Peroran gan Dinas atau Kendar aan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	223,146,600	DAU	0 Unit	9,289,500	Penambahan untuk biaya pemeliharaan kendaraan dinas
		3 Pemeliharaa n Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	25,090,400	30 Unit	31,851,000	3 Pemelih araan Peralata n dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	38,704,000	DAU	0 Unit	6,853,000	
	TOTAL				8,916,708,169		10,335,566,169				8,013,113,744			(2,322,452,425)	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025. Dengan adanya Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 akan sangat membantu dalam penyusunan rencana perubahan anggaran sehingga lebih tepat untuk melaksanakan kegiatan yang diprioritaskan. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Perubahan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 dan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan daerah.

Selanjutnya dengan disusunnya Renja Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai tolak ukur keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan pada Tahun Anggaran 2025.

Pasuruan, Juni 2025
Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Pasuruan



DIANO VELA FERY S. S.Sos, MA

Pembina Utama Muda

NIP. 197311161992031001

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

4.1 Kesimpulan Penting

Kesimpulan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan diarahkan untuk mendukung pencapaian visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden;
2. Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan Perangkat Daerah pada tahun 2025 setelah dilakukan evaluasi pada tahun berjalan sampai dengan Triwulan ke-2 tahun 2025;
3. Anggaran pada Perubahan Renja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 mengalami penyesuaian penambahan dan pengurangan anggaran atau kegiatan dikarenakan adanya perubahan arah kebijakan pembangunan daerah berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui P-RKPD dan P-APBD Tahun Anggaran 2025, dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025;
4. Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan

4.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 yang harus diperhatikan :

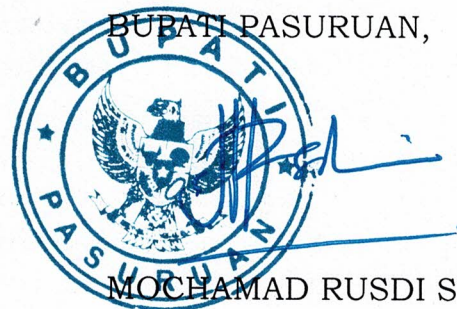
1. Seluruh Bidang dan Sub Bagian berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat pada dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, serta masyarakat maupun stake holder;
2. Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja daerah dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, diperlukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan kegiatan yang dipedomani dan dijabarkan dalam penyusunan rancangan program kerja.

4.3 Pengendalian dan Evaluasi

Dalam rangka menjaga efektifitas pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 dilakukan pengendalian dan evaluasi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengendalian Perubahan Renja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 untuk memastikan pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan berjalan sesuai rencana.
2. Seluruh jajaran pada Perangkat Daerah wajib melaksanakan evaluasi setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan baik berupa realisasi anggaran maupun realisasi kinerja terhadap target indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah.
3. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Kepala Perangkat Daerah yang mengampu unsur penunjang perencanaan dan menjadi bahan penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk tahun berikutnya.

BUPATI PASURUAN,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO